

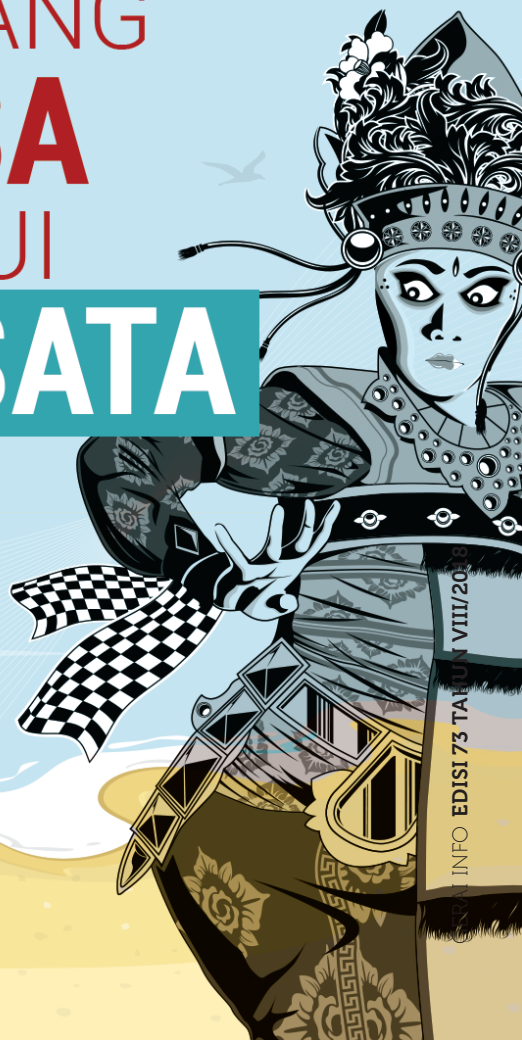
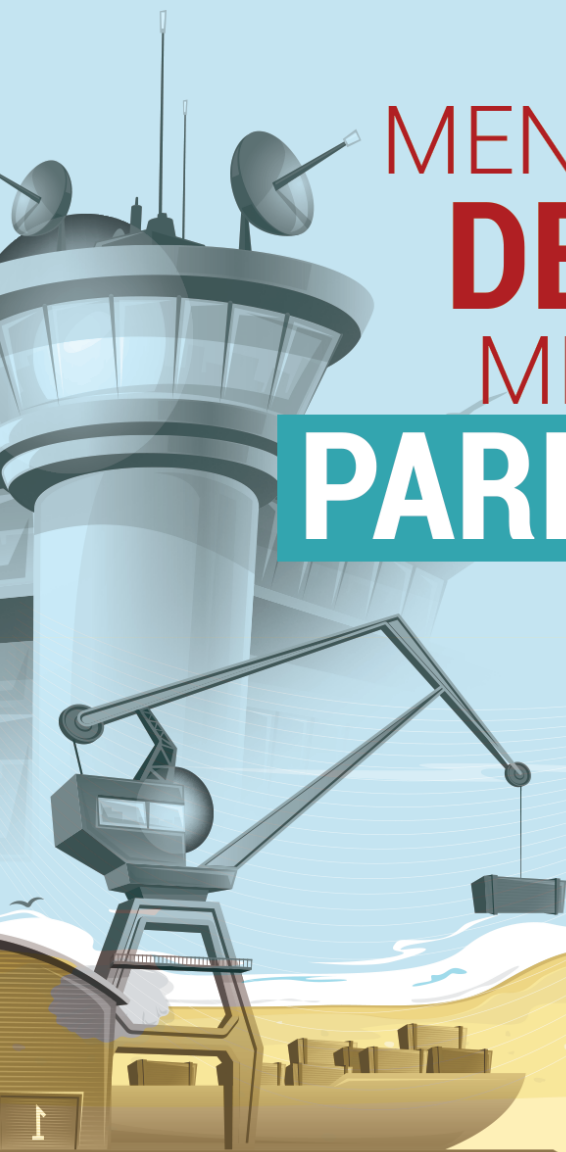
GeraiInfo



>>3A2P

MENDULANG
DEVISA
MELALUI

PARIWISATA

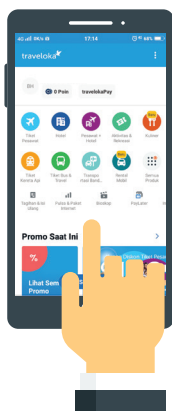


03 |
SALAM

04 | EDITORIAL
Bersatu untuk Indonesia

05 | SOROT

Dorong Pariwisata Melalui Medsos



08 | TRENDING

Wadah Harmoni Kebijakan Pusat dan Daerah

12 | TRENDING
Mudah Berwisata dengan Transaksi Nontunai

14 | TRENDING
Jaga Stabilitas Melalui Relaksasi FX Swap

16 | TRENDING
Sovereign Credit Rating (SCR) Menjaga Asa Membangun Bangsa

20 | POTRET
Sambut Bandara Baru dengan Kopi Menoreh

22 | BICARA
3 Pilar Strategis Menuju Kelas Dunia

26 | INSPIRASI
Lebih Personal dengan Teknologi Digital



08 |
Junanto Herdiawan

Wadah Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah



10 |
Illinia Ayudhia Riyadi

Mendulang Devisa Melalui Pariwisata



14 |
Cecep Ridwan

Jaga Stabilitas Melalui Relaksasi FX Swap



16 |
Solikhah

SCR Menjaga Asa Membangun Bangsa



20 |
Andi Adityaning Palupi

Sambut Bandara Baru dengan Kopi Menoreh



Redaksi menerima kiriman naskah melalui e-mail: bicara@bi.go.id. Redaksi berhak mengubah tulisan sesuai dengan kepentingan Gerai Info

GeraiInfo

Penanggung Jawab: Agusman | **Pemimpin Redaksi:** Junanto Herdiawan | **Redaksi Pelaksana:** Jeffri D Putra, Cecep Ridwan, Mirza Afifa, Any Ramadhaningsih, Shomita F Insary, Afif Anggoro | **Kontributor:** Junanto Herdiawan, Rakhma Fatmaningrum, Illinia Ayudhia, Cecep Ridwan, Solikhah, Andi Adityaning Palupi, Jeffri D Putra

Konsultan: Republika

Alamat Redaksi: Departemen Komunikasi Bank Indonesia
Jl. M. H. Thamrin No. 2 Jakarta

Telp. Contact Center: (021) 131,
e-mail: bicara@bi.go.id, www.bi.go.id

Bank Indonesia
 @bank_indonesia
 bank_indonesia
 Bank Indonesia Channel



Pariwisata Menjadi PR Bersama

Indonesia memiliki anugerah sebagai negara dengan potensi alam yang memikat. Karakter budaya masyarakat dari Sabang sampai Merauke juga menjadi daya tarik yang memukau bagi pelancong dari negara-negara lain. Faktor-faktor ini yang kerap menjadi daya jual pariwisata Indonesia di mata dunia. Sadar akan potensi ini, pemerintah pun memberikan perhatian yang besar. Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan otoritas terkait lainnya sepakat untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata.

Ada tiga alasan utama yang membuat BI memandang pariwisata perlu didorong. Pertama, pariwisata adalah penyumbang devisa ketiga terbesar setelah CPO dan batubara sehingga potensinya ke depan sangat besar untuk devisa. Karena itu, secara langsung bisa mengurangi defisit transaksi berjalan. Kedua, sektor pariwisata bisa pula untuk menopang ekonomi Indonesia ke depan. Ini mengingat pariwisata memiliki karakteristik *quick yielding* yang dapat menghasilkan devisa lebih cepat dibandingkan dengan kegiatan ekspor yang dilakukan secara konvensional. Alasan ketiga adalah sektor pariwisata juga bisa mendorong kesempatan kerja dan mengatasi kemiskinan.

Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan sektor pariwisata antara lain melalui rapat koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (Rakorpusda) yang diselenggarakan di Yogyakarta pada Rabu, 29 Agustus 2018. Fokus pembahasan Rakorpusda yaitu menyusun dan sinergi kebijakan yang diperlukan untuk akselerasi pengembangan sektor pariwisata. Harapannya, sektor pariwisata dapat dikelola dengan baik dan bisa memberikan kontribusi untuk membangun ekonomi yang lebih baik. ■



Bersatu untuk Indonesia

Agusman Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia

Presiden Joko Widodo telah menetapkan pariwisata sebagai *leading sector* perekonomian bangsa. Ini berarti pemerintah dan seluruh elemen masyarakat wajib bekerja sama. Sektor pariwisata di 2019 ditargetkan menyumbang 20 miliar dolar AS dari 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara, sehingga dapat diandalkan menjadi penyumbang bagi neraca transaksi berjalan.

Bank Indonesia (BI) turut menyiapkan langkah-langkah untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Dalam majalah *Gera! Info* edisi 73 ini, pembahasan berfokus pada sejumlah upaya untuk mendorong sektor pariwisata. Seperti antara lain pada rubrik *Trending*, hadir pembahasan tentang Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) atau *less cash society* yang merupakan program unggulan BI.

Program ini bertujuan untuk memudahkan wisatawan bertransaksi, melalui pemanfaatan *delivery channel* maupun penggunaan instrumen pembayaran nontunai yang tersedia untuk bertransaksi, seperti kartu ATM/debet, kartu kredit, dan uang elektronik. Bahkan untuk mendukung program GNNT tersebut, penyediaan infrastruktur yang lengkap dan memadai terus dilakukan seperti penyediaan mesin ATM dan Electronic Data Capturing (EDC) di berbagai toko atau *merchant* di lokasi tujuan wisata.

Sedangkan, pada rubrik *Potret*, kami mengajak pembaca untuk menelusuri upaya Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui pengembangan agrowisata terpadu di Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk mengusung komoditas unggulan agar mencapai pasar yang lebih luas, terpilih lah klaster Kopi Menoreh untuk dibina dan diberikan pelatihan intensif oleh BI DIY.

Kita perlu bersatu menyamakan langkah untuk mendukung kebijakan pemerintah. Ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan. Karena keramahan bangsa Indonesia adalah ciri khas masyarakat negeri ini, maka bersikap ramah dan siap membantu bisa menjadi awal yang baik untuk memberikan dukungan bagi pariwisata Tanah Air. Atau, hal lain yang tak kalah sederhana adalah membuang sampah pada tempatnya. Hal sederhana yang bisa dimulai saat ini juga untuk Indonesia yang lebih bersih. Sebuah perubahan sederhana untuk mewujudkan pesona Indonesia yang sesungguhnya. ■



Dorong Pariwisata Melalui Medsos

Setelah berbulan-bulan bekerja dan berkutat dengan aktivitas sehari-hari, tidak sedikit yang memilih untuk berlibur sekadar untuk lepas sejenak dari rutinitas. Alhasil, beragam tempat wisata dalam dan luar negeri menjadi pilihan. Masyarakat berbondong-bondong memilih tempat berlibur favorit untuk melepas kepenatan.

Seperti yang dilakukan Safitri Ramdhani (27 tahun). Untuk urusan berwisata murah meriah, ibu satu anak ini lebih suka memilih tempat yang ramah bayi alias *baby friendly*. Berhubung anaknya masih usia batita, kini tempat yang makin menjadi incarannya antara lain, wisata *outdoor* semisal Lapangan Banteng atau Taman Suropati di kawasan ibu kota, Jakarta. Selain hemat, karena masuknya gratis, tempat terbuka cocok untuk sang anak bereksplorasi dan mengenal banyak orang.

Sayangnya, dia mengaku cukup sering menemukan tempat-tempat wisata dalam negeri yang kurang terawat. Alih-alih biaya akomodasi yang lumayan menguras kocek membuatnya puas, kadangkala kecewa yang ia dapat. Perempuan yang enggan menyebutkan

destinasi mana yang kurang terawat itu berharap infrastruktur dan biaya akomodasi untuk liburan dalam negeri semakin diperbaiki.

"Mbok ya tiket pesawatnya jangan mahal-mahal. Apalagi tiket masuk ke tempat wisatanya, kalau sampai sana fasilitas yang diberikan sesuai *sih nggak* apa-apa ya. Tapi kebanyakan sudah mahal, tempatnya kotor, tidak terawat, *kan* jadi kecewa, sedih aku," ujar warga Jakarta Selatan itu.

Bukannya ia tidak menyukai tempat-tempat wisata dalam negeri, namun urusan biaya masih menjadi penghambat. Dia mencontohkan Raja Ampat, Papua, yang biaya pergi ke sana lebih mahal dibandingkan saat ia ke luar negeri, khususnya kawasan Asia.

"Itulah mengapa saya lebih suka ke luar negeri, dihitung-hitung, wisata ke dalam negeri walau hanya ke Bali, *budget* bisa bengkak banget," ujarnya.

Alasan Safitri cukup sering liburan ke luar negeri, salah satunya karena menerima jasa titip barang. Liburan, menurutnya, menjadi bonus yang lumayan. Kendati begitu, untuk berlibur, perempuan yang juga seorang pekerja lepas ini mengaku tidak menyiapkan dana khusus. Yang terpenting, uang yang ia pegang tidak boleh dihabiskan untuk saat liburan. Terkadang ia mengakalinya dengan mengunjungi tempat yang menggratiskan biaya masuk.





Untuk liburan, ia tidak terlalu mewajibkan memakai kartu kredit. Terkecuali dalam kondisi darurat. "Kalau saya hambur-hamburkan, memang terpaksa pakai CC (kartu kredit) buat jadi penyelamat hidup," tuturnya.

Alfiana Ulfa, warga Bogor, Jawa Barat juga mengharapkan destinasi domestik semakin baik. Bagi Ulfa, sapaan Alfiana, upaya pemerintah dalam mempromosikan destinasi cukup bagus. Hanya, ia berharap pelayanan lebih ramah, akses jalan yang bagus, tiket terjangkau serta wisata domestik yang dibuat lebih menarik dengan kreasi-kreasi *out of the box* agar tidak monoton. "Inginnya tempat yang didatangi sesuai ekspektasi, *nggak* mengecewakan, bisa terkesan, bikin ingin balik lagi, bisa buat jadi bahan cerita ke teman-teman, minimalnya hati bahagia, *nggak* malah *bete* karena tidak sesuai, tiket mahal, pelayanan kurang ramah," ujarnya.

Perempuan yang bekerja di kantor Pemerintah Kota Bogor itu mengaku terus ingin mengeksplorasi destinasi dalam negeri. Ulfa paling menyukai Bandung. Berwisata ke Kota Kembang rupanya telah membuat perempuan berusia 25 tahun itu ketagihan.

Selain karena jarak Bogor-Bandung tidak terlalu jauh, bisa ditempuh menggunakan motor dengan waktu 4-5 jam, destinasi di sana terbilang banyak, seolah tidak ada habisnya. Beberapa destinasi Bandung seperti Dusun Bambu, Floating Market, dan Kawah Putih, dianggapnya tidak mengecewakan. "Walaupun kalau di motor rada bikin pegel tapi karena lewat Puncak, Cianjur yang udaranya dingin, jadi bikin perjalanan tetap nyaman," ujarnya.

Untuk dana berlibur, Ulfa memilih menabung terlebih dulu sebelum berangkat liburan. Sesekali ia juga mengandalkan hasil bisnis jualan daring. Lantaran itu pula, Ulfa tidak mengandalkan kartu kredit untuk modal berlibur. Selain menjaga diri agar tidak konsumtif, Ulfa lebih memilih tidak memaksakan diri jika dana belum terkumpul untuk berwisata.

Informasi digital

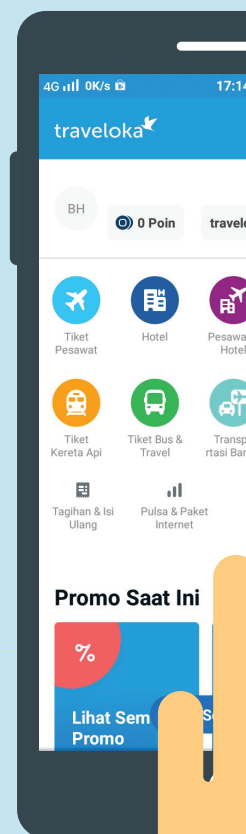
Menurut Menteri Pariwisata Arief Yahya, tren berwisata saat ini baik personal, *mobile* dan interaktif sudah serbadigital. Bahkan, penggunaan teknologi digital ini dianggap empat kali lebih efektif dibandingkan media konvensional. Tidak hanya itu, menurut dia, masyarakat kita pun mencari informasi secara digital. "Sekitar 70 persen *search and research* sudah digital," ujar Arief.

Itulah yang kemudian menjadi peluang tersendiri bagi kehadiran *e-commerce* travel seperti Traveloka. Kemudahan menelusuri segala informasi terkait wisata pun ditawarkan oleh *e-commerce* tersebut. Misalnya, Traveloka menawarkan satu kanal, Go Beyond, yang di dalamnya memuat termasuk 10 destinasi prioritas dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

Seperti diungkap PR Manager Traveloka, Busyra Oryza, pada kanal ini, ada informasi-informasi menarik agar kita semakin lebih mengenal dan tertarik mengeksplorasi destinasi tersebut.

Selain itu, Busyra mencontohkan, banyak aplikasi agen perjalanan daring yang memudahkan masyarakat dari mulai pesan akomodasi hingga mencari kuliner rekomendasi.

Menurutnya, setiap wisatawan memiliki preferensi tertentu saat mengunjungi sebuah destinasi. Dia pun berharap pertumbuhan bisnis ini terus positif dan bisa lebih banyak lagi memberikan fitur yang memudahkan mereka yang ingin bepergian. Fitur yang paling digemari, menurutnya, bergantung kebutuhan. Di Traveloka, ada





Pemerintah agar lebih fokus ke jaringan, bukan cuma infrastruktur.

fitur notifikasi harga, sehingga bisa membantu pelancong menentukan waktu yang tepat memulai perjalanan dengan memantau harga perjalanan. Termasuk memantau akhir tahun, karena biasanya harga penerbangan bisa naik turun.

Saat ini sejumlah kota-kota besar di Indonesia memang masih menjadi destinasi favorit. Namun, ada pula beberapa tujuan wisata yang mulai menunjukkan popularitasnya pada tahun ini. Menurut Busyra Oryza, tren

kunjungan wisata tahun ini memang tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Baik dalam maupun luar negeri, kota besar, seperti Jakarta, Bali, Bandung, Yogyakarta, Medan, Makassar, Singapura, Malaysia, masih mendominasi pesanan perjalanan.

Tetapi, destinasi *anti-mainstream* juga, menurut Busyra, boleh dibilang mulai kian diminati. Orang mulai ingin mencoba tujuan lain yang pengunjungnya belum sebanyak kota besar. "Bisa dikatakan begitu (*anti-mainstream*), kita lihat pengaruhnya ada juga dari media sosial. Jadi ada juga *secondary city*, kayak Malang, Solo, dari sisi domestik. Labuan Bajo juga mulai populer," kata Busyra.

Sementara VP Brand Marketing, Tiket.com. Maria Risa Puspitasari melihat masyarakat lebih hobi pergi ke tempat-tempat populer yang gampang diakses. Pertama, wisnus lebih menyukai wisata yang berkaitan dengan *explorer* (menjelajah), seperti *adventure* (petualangan) atau lebih

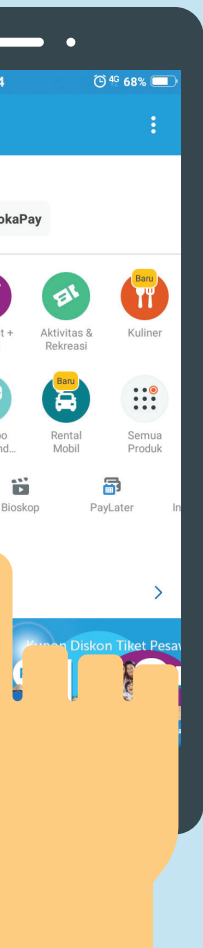
sekadar berwisata kuliner untuk dibagi melalui media sosial. "Dari situ, banyak yang liburan itu untuk karena misalnya 'Gue' sudah lama *nggak update* di media sosial," kata Mira.

Destinasi yang makin populer, termasuk di media sosial, ada Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan kemudahan transportasi dan tawaran wisata alam menarik, kawasan ini kerap menjadi pilihan. Sedangkan, pilihan menuju Raja Ampat, misalnya, tidak terlalu banyak lantaran aksesnya yang masih terbilang mahal.

Tantangan bisnis sektor pariwisata dianggapnya bergantung musim, tidak seperti jualan barang yang cenderung dibutuhkan orang setiap hari. Bisnis ini bisa bergantung musiman, seperti liburan yang perlu segera dimanfaatkan momentumnya.

Tantangan lainnya adalah masalah teknologi. Apalagi bagi wisman yang pastinya menginginkan keamanan dan kenyamanan di manapun harus ada koneksi. Sedangkan di wilayah Indonesia, hanya baru beberapa kota yang memiliki fasilitas koneksi lengkap. "Kan kalau di daerah itu tidak ada koneksi, susah. Makanya kenapa Bali lagi, Lombok lagi karena itu lengkap. Tapi dengan banyak bandara baru juga mungkin maksudnya menghapus kekhawatiran orang berwisata," katanya.

Untuk tahun depan, segi politik boleh jadi memengaruhi kunjungan wisatawan, karena ada momen pemilihan kepala negara. Otomatis urusan keamanan pasti akan berpengaruh pada kunjungan wisata. Dia berharap tak hanya dari segi infrastruktur, tetapi juga jaringan koneksi yang diharapkan lebih merata. "Jadi masukan ke pemerintah agar lebih fokus ke jaringan, bukan cuma infrastruktur, supaya komunikasi juga lebih nyaman," ungkapnya. ■





Wadah Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

Memiliki karunia berupa 16.056 pulau bernama yang telah secara resmi tercatat di PBB, wilayah Indonesia terangkum dalam 34 provinsi. Dengan jumlah provinsi sebanyak itu, apa jadinya bila kebijakan pusat dan daerah dilaksanakan tanpa koordinasi? Belum lagi menghadapi tantangan jarak dan waktu. Sebagai negara kesatuan, amanat penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18. Sehingga setiap wilayah di Indonesia dapat menjalankan roda perekonomiannya secara mandiri.

Akan tetapi, otonomi daerah tidak menjadikan semua provinsi tersebut mengambil keputusan tanpa bersinergi dengan pemerintah pusat. Salah satu bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah adalah terselenggaranya Rapat



Junanto Herdiawan

Direktur

Departemen Komunikasi



Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Rakorpusda). Inisiasi Rakorpusda antara lain untuk menjadi wadah pembahasan permasalahan dan tantangan serta rekomendasi dalam mewujudkan sinergi kebijakan makroekonomi antara Bank Indonesia dengan pemerintah pusat dan daerah. Stabilitas makroekonomi yang terjaga disertai struktur perekonomian yang kuat merupakan prasyarat untuk membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih kuat, berkelanjutan, berimbang, dan inklusif.

Pada tahun 2018 ini, telah dua kali dilaksanakan Rakorpusda, yakni pada bulan April di Batam dan pada bulan Agustus di Yogyakarta. Rakorpusda Batam bertujuan untuk pengembangan industri ekspor sehingga memerlukan peningkatan infrastruktur untuk mempermudah akses. Ini dikarenakan Batam merupakan salah satu daerah yang dinilai memberikan kontribusi bagi ekspor nasional.

Dari Rakorpusda Batam, dihasilkan empat kebijakan utama untuk mendongkrak kinerja neraca transaksi berjalan agar dapat menjadi surplus dari defisit. Kebijakan pertama, pemberian kemudahan perizinan dan insentif fiskal untuk meningkatkan industri berorientasi ekspor. Kedua, menurunkan biaya logistik industri domestik melalui peningkatan kapasitas dan efisiensi infrastruktur konektivitas, air, dan listrik.

Kebijakan ketiga, penguatan sumber daya manusia untuk mendukung penyediaan tenaga kerja dengan *skill* yang sejalan dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan otomatisasi proses produksi. Kebijakan keempat, perluasan pasar ekspor industri nasional dengan menambah kerja sama perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral (*Free Trade Agreement*-FTA dan *Preferential Trade Agreement*-PTA).

Sementara Rakorpusda Yogyakarta difokuskan untuk mengakselerasi sektor pariwisata untuk mendukung



Rakorpusda Yogyakarta difokuskan mengakselerasi pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penguatan ketahanan eksternal Indonesia.

pertumbuhan ekonomi dan penguatan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Khususnya, untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan Indonesia yang mengalami pelebaran hingga mencapai tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB.

Rakorpusda Yogyakarta menyepakati 9 strategi kebijakan. Pertama, penetapan strategi pencapaian kinerja pariwisata melalui peningkatan aksesibilitas, keragaman atraksi, kualitas amenities, didukung oleh penguatan promosi, dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata (3A2P). Kebijakan kedua, penguatan data dan informasi.

Ketiga, peningkatan akses pembiayaan bagi kegiatan usaha di sektor pariwisata. Keempat, penerapan intensifikasi layanan sistem pembayaran dan ekonomi digital serta ekosistemnya. Kelima, penguatan sinergi promosi destinasi pariwisata. Keenam, penguatan akses atau konektivitas darat dan udara.

Kebijakan ketujuh, pengembangan atraksi yang terintegrasi. Kedelapan, peningkatan amenities. Kesembilan, peningkatan kualitas SDM dan usaha pariwisata. ■



TRENDING



Mendulang Devisa Melalui Pariwisata



Illinia Ayudhia Riyadi

Asisten Manajer, Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter

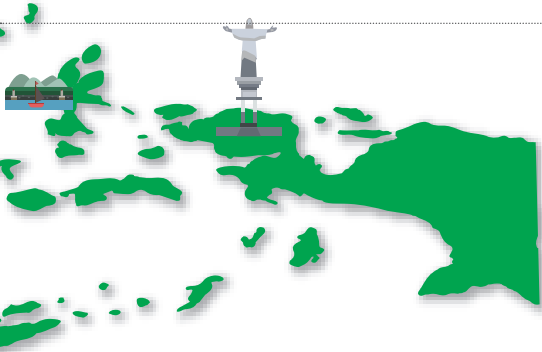
Melihat berbagai media sosial, maka setiap orang bisa mengetahui keindahan alam di Indonesia. Terdapat banyak foto dan video yang menggambarkan daya tarik untuk berwisata ke Indonesia. Akan tetapi, menilik lebih dalam keindahan itu, banyak yang mengungkapkan bahwa objek pariwisata di Tanah Air ternyata tidak didukung oleh fasilitas dan infrastruktur yang memadai.

Kondisi jalan yang buruk, tak adanya tempat makan yang memadai, hingga kurangnya toilet untuk para pengunjung menjadi beberapa hal yang dikeluhkan. Hal ini sungguh disayangkan mengingat

besarnya potensi yang dimiliki oleh sektor pariwisata terhadap penerimaan negara. Bahkan saat ini, pariwisata merupakan salah satu penyumbang devisa nasional terbesar ketiga setelah ekspor minyak sawit (CPO) dan batu bara. Karenanya, bayangkan jika kemudian potensi pariwisata tersebut dapat dioptimalkan.

Berdasarkan laporan United Nations World Tourism Organization (UNWTO), perolehan devisa Indonesia dari sektor pariwisata mencapai 14,2 miliar dolar AS pada tahun 2017. Angka itu meningkat dibandingkan perolehan 2015 yang sebesar 12,2 miliar dolar AS.

Sayangnya, kontribusi pariwisata



Bank Indonesia menyadari pentingnya sektor pariwisata untuk mendukung perolehan devisa.

dalam perolehan devisa Indonesia masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan pencapaian global maupun negara sekawasan. Laporan UNWTO menunjukkan bahwa pada tahun 2016, perolehan devisa Indonesia dari sektor pariwisata hanya sebesar 12,6 miliar dolar AS. Angka itu jauh tertinggal dibandingkan Thailand yang mampu mencapai 52,5 miliar dolar AS hanya dari sektor pariwisata pada tahun yang sama.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak aspek dari sektor pariwisata Indonesia yang perlu dibenahi. Hal ini sejalan dengan hasil laporan *The Travel & Tourism Competitiveness Report* yang dirilis World Economic Forum pada tahun 2017. Terdapat aspek dari sektor pariwisata Indonesia yang tertinggal jauh dari Thailand.

Aspek yang tertinggal paling jauh dari Thailand adalah jasa-jasa pendukung pariwisata yang meningkatkan akses dan kenyamanan pengunjung, semisal akses dan amenitas. Aspek akses sektor pariwisata yang perlu diperbaiki meliputi kondisi infrastruktur, ketersediaan transportasi, konektivitas, dan integrasi antardestinasi. Sementara itu, aspek amenitas sektor pariwisata mencakup kebersihan, ketersediaan akomodasi, dan fasilitas di destinasi wisata yang perlu terus ditingkatkan.

Perlunya perbaikan aspek akses dan amenitas pada sektor pariwisata juga semakin terafirmasi melalui hasil laporan Bank Indonesia. Bahkan, laporan tersebut juga menekankan pentingnya perbaikan aspek atraksi yang meliputi *point of interest*, keramahtamahan (*hospitality*), dan ketersediaan harga yang kompetitif.

Upaya peningkatan sektor pariwisata perlu dimulai dengan perbaikan 3 aspek tersebut, yaitu akses, amenitas, dan atraksi (3A). Selain itu, peningkatan promosi dan pelaku pariwisata (2P) juga menjadi aspek penting untuk mendukung pencapaian target kinerja pariwisata 2018-2024. Hal ini yang mendasari penetapan strategi pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan penerimaan devisa, yaitu 3A2P.

Bank Indonesia (BI) menyadari pentingnya sektor pariwisata untuk mendukung perolehan devisa. Oleh karena itu, BI terus bersinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk terus mendorong kinerja sektor pariwisata. Salah satu sinergi yang dilakukan antara lain tercermin dari pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Rakorpusda) yang telah berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 29 Agustus 2018 dan menghasilkan 9 butir kesepakatan untuk mendorong sektor pariwisata. ■





Mudah Berwisata dengan Transaksi Nontunai



Rakhma Fatmaningrum

Manajer Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran

Sektor pariwisata saat ini menjadi fokus pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan ketahanan eksternal perekonomian. Sektor ini dianggap memiliki peran strategis karena dapat mendorong peningkatan penerimaan devisa yang pada gilirannya nanti diharapkan dapat memperbaiki neraca transaksi berjalan. Salah satu strategi kebijakan untuk mendukung sektor pariwisata di bidang sistem pembayaran (SP) adalah melakukan intensifikasi layanan sistem pembayaran dan ekonomi digital serta ekosistemnya di semua destinasi wisata.

Adapun satu cara yang ampuh untuk menarik minat masyarakat berwisata adalah kemudahan bertransaksi menuju dan saat berada di tempat wisata. Mulai dari pemesanan tiket dan akomodasi, pembayaran transportasi, hingga urusan bertransaksi di tempat wisata.

Dengan adanya perkembangan teknologi dan inovasi yang saat ini telah menyentuh pada industri keuangan, maka para wisatawan akan semakin dimudahkan dalam melakukan transaksi keuangan secara *online* melalui internet. Namun, pembayaran secara *online* perlu didukung oleh kanal sistem pembayaran yang dapat mendukung transaksi pembayaran dengan menggunakan instrumen pembayaran dari berbagai negara.

Salah satu usaha untuk memudahkan wisatawan dalam bertransaksi adalah dengan menggalakkan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) atau *less cash society* melalui pemanfaatan *delivery channel* maupun penggunaan instrumen pembayaran nontunai yang tersedia untuk bertransaksi, seperti kartu ATM/debet, kartu kredit, dan uang elektronik. Dalam mendukung program GNNT tersebut, maka penyediaan infrastruktur yang lengkap dan memadai terus dilakukan oleh penyedia jasa sistem pembayaran, seperti penyediaan mesin ATM dan *electronic data capture* (EDC) di berbagai toko





Strategi kebijakan sistem pembayaran di sektor pariwisata adalah dengan intensifikasi layanan dan ekonomi digital serta ekosistemnya.

atau *merchant* di lokasi pembelanjaan wisatawan. Selain itu, perlu terus digalakkan kewajiban transaksi menggunakan Rupiah untuk aktivitas pembayaran di daerah wisata.

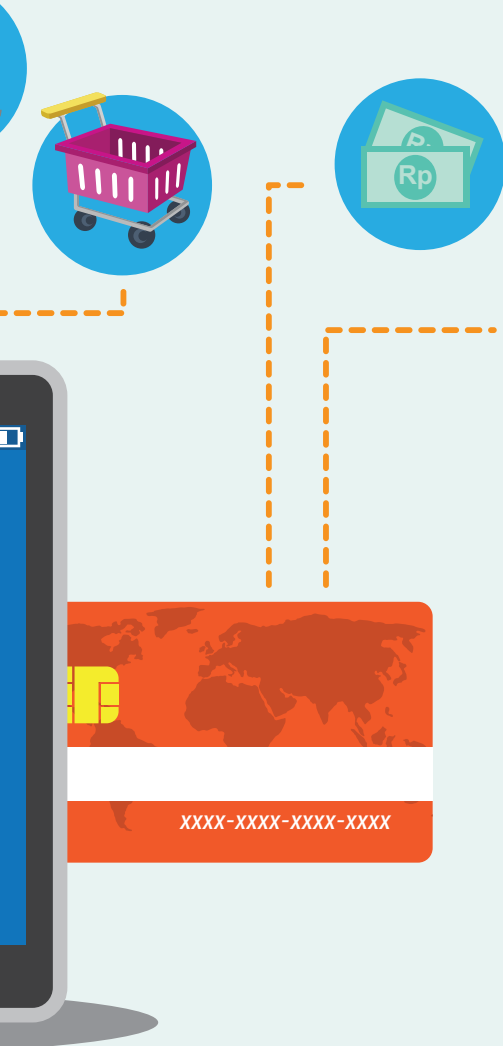
Dalam rangka memperlancar transaksi ritel domestik, BI telah mengimplementasikan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Implementasi GPN akan membantu menciptakan ekosistem sistem pembayaran yang interkoneksi dan interoperabilitas, serta meningkatkan perlindungan konsumen. Caranya, antara lain melalui pengamanan data transaksi nasabah dalam setiap transaksi, serta mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, efisiensi intermediasi, dan ketahanan sistem keuangan.

Seiring dengan kewajiban peningkatan standar keamanan transaksi dan pemrosesan domestik melalui GPN serta penguatan aspek perlindungan konsumen dan keamanan, BI melakukan penyempurnaan Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Penyempurnaan dimaksud juga dilakukan sebagai upaya menyelaraskan kebijakan uang elektronik dengan perkembangan teknologi, inovasi, dan model bisnisnya. Di sisi lain, penyempurnaan ini diharapkan dapat memperlancar transaksi pembayaran, terutama dengan semakin maraknya pemanfaatan uang elektronik yang berbasis teknologi *chip* maupun *server*.

Perlindungan konsumen

Dukungan terhadap GNNT di sektor pariwisata perlu juga disertai dengan berbagai kegiatan sosialisasi bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait.

Pihak-pihak yang mendukung keberhasilan layanan sistem pembayaran di sektor pariwisata, antara lain *merchant* maupun pemegang kartu debit/ATM, kartu kredit, dan uang elektronik. Pihak ini perlu terus ditingkatkan pengetahuan dan pemahamannya terkait produk, jasa/pelayanan SP, dan perlindungan konsumen di bidang SP. Termasuk pemahaman kewajiban penggunaan uang Rupiah sebagaimana diatur dalam PBI No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI. Sehingga diharapkan pada akhirnya sistem pembayaran yang semakin aman, efisien, lancar, dan, andal dapat terwujud. ■





Jaga Stabilitas Melalui Relaksasi FX Swap



Cecep Ridwan

Asisten Direktur Departemen Komunikasi

Berbagai dinamika mewarnai perekonomian global tahun 2018. Mulai dari normalisasi kebijakan suku bunga bank sentral AS Federal Reserve/The Fed yang berdampak pada pengetatan likuiditas, sentimen negatif terhadap perang dagang negara-negara adidaya (AS - Tiongkok) yang menyebabkan terdepresiasinya hampir semua mata uang *emerging market* (EM) termasuk Rupiah, dan mengakibatkan krisis keuangan Turki dan krisis ekonomi Argentina dan Venezuela. Tidak hanya itu, pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas yang melambat serta proyeksi harga minyak yang lebih tinggi berdampak pada stabilitas perekonomian dan daya saing negara *emerging market* seperti Indonesia. Kondisi ini karena perkembangan suku bunga, arus modal masuk dan keluar serta nilai tukar mata uang.

Dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia terus melakukan berbagai upaya yang dilakukan antara lain dengan penguatan strategi operasi moneter serta pendalaman pasar keuangan melalui kebijakan FX





Swap pengelolaan likuiditas dan FX Swap *hedging* (lindung nilai).

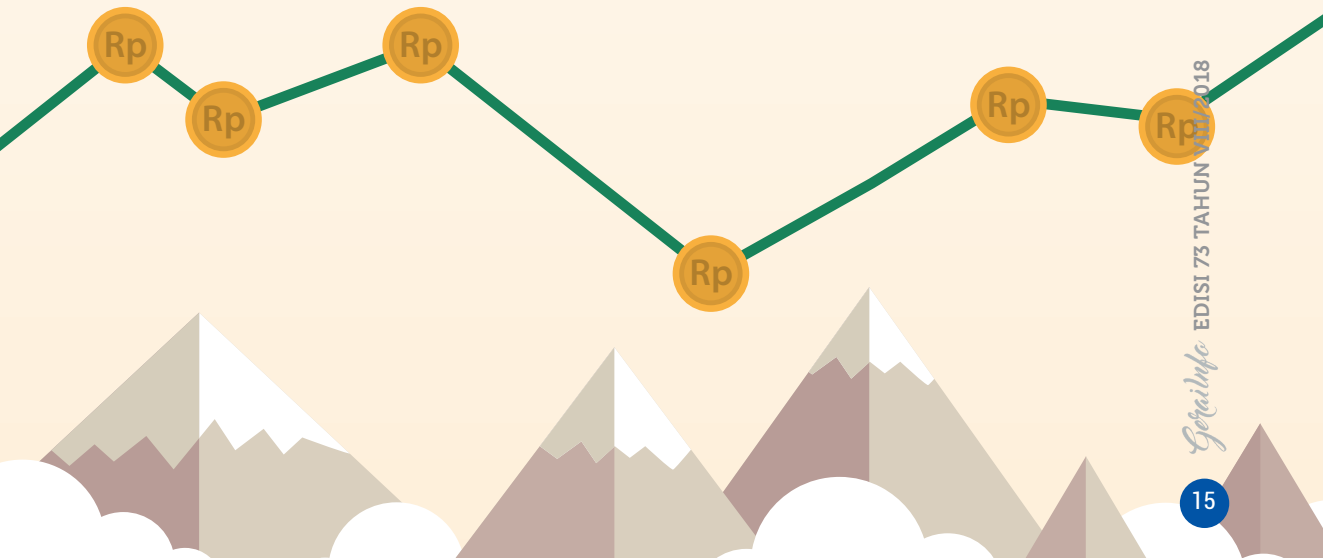
Kebijakan FX Swap bertujuan untuk mengoptimalisasikan penggunaan transaksi swap kepada Bank Indonesia sebagai instrumen lindung nilai, baik dalam rangka operasi moneter maupun dalam rangka lindung nilai (*hedging*) dengan tingkat harga yang lebih kompetitif. Hal ini sangat penting di tengah terbatasnya pasokan valuta asing di pasar valuta asing domestik, khususnya yang berasal dari pelaku perdagangan internasional (eksportir). Selain itu Bank Indonesia juga melakukan penyesuaian minimum FX Swap lindung nilai kepada Bank Indonesia sebesar 2 juta dolar AS.

Penyesuaian nilai minimum ini akan menjangkau nasabah yang lebih luas. Karena pasar FX Swap lindung nilai selama ini kurang bergeliat meski sudah diinisiasi sejak empat tahun lalu. Kebijakan ini akan mendorong eksportir menukarkan valasnya melalui perbankan bukan melalui pasar spot.

Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyediaan swap valuta asing baik terkait operasi moneter maupun lindung nilai dengan

Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyediaan swap valuta asing baik terkait operasi moneter maupun lindung nilai dengan tingkat harga yang lebih murah.

tingkat harga yang lebih murah. Dengan langkah ini diharapkan mampu menambah pasokan likuiditas valuta asing serta menjaga keyakinan pelaku pasar terhadap likuiditas valas di pasar domestik. Hal ini pada gilirannya dapat mendukung stabilitas nilai Rupiah dan mengendalikan risiko peningkatan defisit transaksi berjalan serta menjaga daya tarik pasar keuangan domestik. ■





Sovereign Credit Rating (SCR)

Menjaga Asa Membangun Bangsa

**Sholihah**

Manajer Departemen Internasional

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan ekonomi di segala bidang, baik pembangunan secara fisik seperti infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. Untuk melakukan pembangunan tersebut, dibutuhkan pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh pemerintah sehingga diperlukan pembiayaan dari pihak swasta, termasuk investor asing.

Bentuk pembiayaan dari investasi asing salah satunya melalui penerbitan obligasi baik di dalam maupun di luar negeri yang juga disebut dengan *portfolio investment* (PI). Peran investor asing tersebut juga dapat dilakukan melalui investasi secara langsung yang biasa disebut dengan *foreign direct investment* (FDI).





Perbaikan SCR Indonesia ini pada akhirnya juga mendukung aliran investasi portofolio ke Indonesia.

Dalam konteks ini, pengelolaan persepsi positif menjadi penting untuk dapat menjaga atau meningkatkan ketertarikan asing terhadap investasi di Indonesia yang merupakan negara *emerging market* sehingga masih membutuhkan pembiayaan asing untuk pembangunan. Kondisi ini tercermin pada *current account* Indonesia yang secara struktural mengalami defisit sejalan dengan kebutuhan impor yang tinggi untuk pembangunan dimana defisit ini harus ditutup antara lain oleh *capital inflows* baik dalam bentuk PI maupun FDI.

Terdapat berbagai indikator yang digunakan dan dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap ekonomi Indonesia dimana salah satunya adalah Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia. SCR adalah nilai atau predikat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat seperti S&P, Moody's dan Fitch terhadap kondisi saat ini dan prospek ekonomi Indonesia. Pada dasarnya SCR menilai kemampuan dan kemauan suatu negara untuk membayar utang luar negeri (*sovereign debt*). Penilaian tersebut dilakukan dengan melihat aspek kelembagaan, ekonomi, fiskal, moneter dan eksternal dari suatu negara dengan skala penilaian yang dapat dikategorikan menjadi dua besaran, yaitu Non Investment Grade (tidak layak investasi) dan Investment Grade (layak investasi) countries.

Indonesia telah mendapatkan predikat Investment Grade (pada level terendah) dari ketiga lembaga pemeringkat utama, yaitu Fitch sejak 2011 pada tingkat BBB-, Moody's sejak 2012 pada tingkat Baa3, dan S&P sejak 2017 pada tingkat BBB-. Indonesia kembali memperoleh peningkatan rating dari Fitch pada Desember 2017 (meningkat dari BBB- menjadi BBB) dan Moody's pada April 2018 (meningkat dari Baa3 menjadi Baa2).

Perbaikan *credit rating* ini pada akhirnya juga mendukung aliran investasi portofolio ke Indonesia mengingat hal ini menjadi salah satu indikator yang digunakan oleh investor untuk keputusan investasi di suatu negara. Pada akhirnya, pemberian predikat Indonesia sebagai *investment grade* dari tiga lembaga rating utama dunia menunjukkan keyakinan dunia atas fundamental ekonomi Indonesia dan kemampuan pengelolaan utang luar negeri yang semakin baik. ■





Sembilan Strategi Dorong Pariwisata

Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan menyepakati upaya untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata dengan memperkuat koordinasi dan menyinergikan kebijakan antar pemangku kepentingan.

ADA SEMBILAN STRATEGI KEBIJAKAN YANG DIRUMUSKAN DARI KEGIATAN TERSEBUT UNTUK DITERAPKAN PADA DESTINASI WISATA PRIORITAS SEBAGAI BERIKUT:

Peningkatan aksesibilitas, keragaman atraksi, dan kualitas amenitas serta promosi dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata (3A2P).



Penguatan data dan informasi melalui penetapan nomenklatur klasifikasi jenis usaha bidang pariwisata.



Peningkatan akses pembiayaan melalui penetapan ketentuan umum penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).



Intensifikasi layanan sistem pembayaran dan ekonomi digital.



Sinergi promosi pariwisata antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia.



Penguatan akses/konektivitas darat dan udara.



Pengembangan atraksi yang terintegrasi antardestinasi wisata.



Peningkatan amenitas.



Peningkatan kualitas SDM dan usaha melalui pendidikan vokasi.





Sambut Bandara Baru dengan Kopi Menoreh



Andi Adityaning Palupi

Manajer Kantor Perwakilan BI DIY

"Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman..."

Penggalan lagu ini menjadi bukti ketika berkunjung ke Kabupaten Kulon Progo di Yogyakarta. Para wisatawan diajak untuk menikmati berbagai pilihan berinteraksi dengan alam. Sebut saja lokasi wisata curug, pantai, hingga air terjun. Namun, boleh jadi belum banyak yang tahu bahwa Kulon Progo juga memiliki potensi lokal lain yang tidak kalah menarik. Ini karena Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa komoditas unggulan, antara lain kawasan Bukit Menoreh yaitu di Sermo-Kalibiru yang terkenal dengan komoditas gula semut, kawasan Nglinggo-Tritis dengan potensi komoditas teh, serta kawasan Suroloyo-Sendangsono dengan komoditas unggulan kopi.

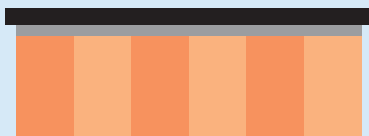
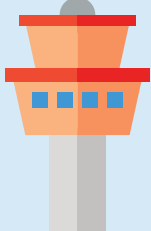
Melihat besarnya potensi Kulon Progo, Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta tergerak untuk berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui pengembangan

agrowisata terpadu. Memilah komoditas unggulan yang dapat diusung untuk mencapai pasar yang lebih luas, terpilih lah klaster Kopi Menoreh untuk dibina dan diberikan pelatihan intensif oleh BI DIY.

Mengapa kopi? Hal ini mengingat sebelumnya BI DIY juga sudah berhasil membina klaster gula semut Kulon Progo dan berorientasi ekspor hingga Benua Eropa. Maka, pada 29 Agustus 2018, anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Erwin Rijanto meresmikan program Local Economic Development (LED) Bank Indonesia yaitu kopi Menoreh Kabupaten Kulon Progo. Peresmian ini termasuk dalam rangkaian kegiatan Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 28-29 Agustus 2018.

Pendampingan klaster Kopi Menoreh memiliki *roadmap* pengembangan selama tiga tahun, yaitu sejak tahun 2018-2020, dengan sasaran kelompoknya adalah kelompok tani Margo Mulyo yang berlokasi di Dusun Madigondo, Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo. Adapun di tahun 2018, pendampingan BI DIY berfokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas produksi kopi dan olahannya.

Program kerja yang akan dilaksanakan antara lain bimbingan teknis pengolahan





Kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, diharapkan mampu mendorong ketahanan ekonomi Indonesia.

kopi yang terstandarisasi dengan penerapan teknologi pendukung, fasilitas magang ke Pusat Penelitian Kopi dan Kakao serta pembangunan sarana pendukung pengembangan kopi Kulon Progo berupa sistem pengairan (irigasi permukaan) untuk mendukung proses peremajaan/intensifikasi tanaman kopi melalui program sosial Bank Indonesia.

Namun, kopi bukanlah satu-satunya alasan untuk mengembangkan potensi di Kabupaten Kulon Progo. Rencana pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo yang akan diresmikan pada tahun 2019 turut menjadi daya pikat yang lain. Berdasarkan data dari PT Angkasa Pura, daya tampung penumpang NYIA mencapai 14-20 juta penumpang per tahun. Ini berarti dua kali lipat dibandingkan kapasitas bandara *existing* di Adi Sutjipto yang hanya mampu menampung 7-8 juta penumpang per tahun. Sudah tentu hal ini menjadi salah satu amunisi pemerintah dalam menyukseskan target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) dan 375 juta pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) pada 2020.

Untuk menunjang pembangunan bandara tersebut, Pemerintah Daerah Kulon Progo akan membangun "Jalur

Bedah Menoreh" sebagai salah satu akses jalan yang menghubungkan kawasan wisata Borobudur dengan bandara baru tersebut. Jalur ini dibangun guna mendorong terciptanya jalur wisata baru di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur, khususnya di sepanjang jalur Bukit Menoreh Kulon Progo. Ini mengingat areal tersebut memiliki bentang alam perbukitan apik dengan suguhan pemandangan yang menakjubkan.

Program kerja pengembangan klaster Kopi Menoreh sendiri tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah DIY (Dinas Pariwisata DIY) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo (BAPPEDA Kulon Progo, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo). Kehadiran tenaga ahli dari Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam LIPI DIY, tokoh masyarakat dan kelompok tani Margo Mulyo (kelompok budidaya, kelompok pengolah, dan kelompok pemasaran) turut mempercepat proses pengembangan ini.

Pendampingan tersebut merupakan wujud pengabdian Bank Indonesia terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pengembangan pariwisata di Indonesia. Melalui kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, diharapkan mampu mendorong ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tingginya gejolak perekonomian global. ■





3 Pilar Strategis

MENUJU KELAS DUNIA



Jeffri D Putra

Deputi Direktur Departemen Komunikasi

Peluang ekonomi keuangan syariah untuk tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia terbuka lebar. Bukan hanya untuk menjawab tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, juga untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan. Karena itu, diperlukan sinergitas dan dukungan untuk mendorong implementasi ekonomi dan keuangan syariah sebagai alternatif dalam perekonomian nasional. Apalagi Indonesia





merupakan *market* potensial bagi tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syariah, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan jumlah penduduk lebih dari 220 juta jiwa, sekitar 87% di antaranya merupakan pemeluk agama Islam, menjadikan *market* ekonomi syariah sangat menjanjikan di negeri ini. Bahkan, bukan tidak mungkin jika ekonomi dan keuangan syariah nantinya dapat 'berteman baik' dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan 'modal' yang lebih dari cukup tersebut, Islamic Financial Services Board (IFSB) dalam laporannya menuliskan aset perbankan syariah Indonesia sudah berada di peringkat ke-9 terbesar secara global, dan jumlahnya mencapai 28,08 miliar dolar AS. Selain itu, aset keuangan syariah Indonesia berdasarkan laporan Global Islamic Finance Report 2017 menempati peringkat ke-10 secara global dengan jumlah mencapai 66 miliar dolar AS. Bahkan Islamic Finance Country Index yang semula 7 pada 2017, menjadi 6 pada 2018. Sementara, pangsa perbankan Indonesia pada Juni 2018 dalam hal aset mencapai sekitar 6% dari semua bank di Indonesia, dengan total pangsa aset dalam industri keuangan syariah mencapai sekitar 85% dari seluruh aset industri keuangan di Indonesia.

Upaya untuk memaksimalkan potensi besar ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia menjadi suatu keharusan. Sambutan Deputy Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo dalam seminar 'The 3rd International Conference on Indonesian Economy and Development' dan 'The 1st International Conference on Islamic Economics' yang berlangsung di Jakarta, menyatakan upaya yang dilakukan Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia berupa perumusan 3 pilar strategis dalam cetak biru.



Aset perbankan syariah Indonesia sudah berada di peringkat ke-9 terbesar secara global, dan jumlahnya mencapai 28,08 miliar dolar AS.

Pertama, Bank Indonesia mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal dengan mengembangkan ekosistem dari berbagai tingkat bisnis syariah. Termasuk di dalamnya seperti pesantren, usaha kecil dan menengah (UKM), dan perusahaan dalam rantai hubungan bisnis untuk memperkuat struktur ekonomi yang inklusif. Program ini dilaksanakan di 4 sektor utama, yaitu industri makanan halal, sektor pariwisata halal, sektor pertanian, dan sektor energi terbarukan. Kedua, Bank Indonesia mendukung distribusi pembiayaan syariah untuk pengembangan rantai nilai halal melalui pendalaman pasar keuangan syariah. Ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi manajemen likuiditas pasar keuangan syariah. Ketiga, untuk meningkatkan peran dan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah secara global dan nasional, diperlukan peran aktif mulai dari pembuat kebijakan, pelaku ekonomi

Tidak terbantahkan lagi bahwa dukungan nyata berbagai pihak dalam mewujudkan ekonomi keuangan syariah menjadi bagian dari perekonomian nasional menjadi sebuah penantian yang serius. Diharapkan tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, namun juga menjadikan Indonesia sebagai *leader* dalam perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat dunia. ■

Dukung Pariwisata Lokal





Lebih Personal dengan Teknologi Digital

Pemerintah saat ini telah menetapkan sektor pariwisata sebagai *core economy* Indonesia. Dengan berbagai keunggulan kompetitif dan komparatif, pariwisata ditargetkan menjadi penghasil devisa terbesar pada 2019. Namun, untuk mencapai target tersebut tentu bukan hal mudah. Apalagi, Indonesia berhadapan dengan para pesaing di kawasan ASEAN. Bukan hanya Thailand yang devisa pariwisatanya lebih dari 40 miliar dolar AS, tetapi juga dengan Vietnam yang mengalami pertumbuhan kunjungan wisatawan sangat signifikan. Meski begitu, Menteri Pariwisata **Arief Yahya** optimistis target tersebut bisa tercapai dengan sejumlah langkah dan kebijakan. Berikut wawancaranya:

Anda menyebutkan, pariwisata merupakan industri yang paling murah investasinya dan mudah menghasilkan devisa. Mengapa?

Dalam peningkatan ekonomi, pariwisata sebagai alat penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), devisa, dan lapangan kerja yang paling mudah dan murah. Ini jika dibandingkan dengan biaya investasi yang harus dikeluarkan untuk peningkatan sektor migas. Investasi di sektor migas akan lebih tinggi karena harus mengeluarkan biaya eksplorasi dan baru bisa menghasilkan devisa dalam beberapa tahun mendatang.

Potensi pariwisata di Indonesia sangat kuat. Kekayaan alam dan budaya Indonesia selalu menempati top 20 di dunia. Hasil riset World Bank juga menunjukkan sektor pariwisata adalah penyumbang yang paling mudah untuk devisa dan PDB suatu negara.

World Bank mencatat investasi di pariwisata sebesar 1 juta dolar AS akan mampu mendorong 170 persen dari PDB. Ini merupakan dampak ikutan tertinggi suatu industri kepada negaranya. Sebab industri pariwisata mampu menggerakkan usaha kecil dan menengah seperti kuliner, cenderamata, transportasi dan lainnya. Data statistik saat ini menunjukkan industri pariwisata merupakan penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Besarannya menempati peringkat kedua penyumbang devisa terbesar setelah CPO.

Sepanjang Januari hingga Juli 2018, raihan devisa dari sektor pariwisata



● **Arief Yahya**
Menteri Pariwisata



mencapai 9 miliar dolar AS. Angka tersebut merupakan hasil dari tingkat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 9,06 juta atau tumbuh 13 persen dibanding tahun lalu di periode yang sama. Tahun ini jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ditargetkan mencapai 17 juta wisman dengan target devisa diproyeksikan mencapai 17 miliar dolar AS. Pada 2019 nanti target devisa diharapkan mencapai 20 miliar dolar AS, yang diharapkan pariwisata sudah menjadi penghasil devisa terbesar.

Sektor pariwisata saat ini menjadi fokus pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan ketahanan eksternal perekonomian. Sejauh ini bagaimana kerja sama antara pemerintah dan BI untuk meningkatkan kinerja sektor pariwisata?

Presiden Joko Widodo telah menetapkan pariwisata sebagai *leading sector* perekonomian bangsa. Ini artinya seluruh kementerian/lembaga wajib bekerja sama dan mendukung untuk pencapaian sektor pariwisata yang di tahun 2019 ditargetkan menyumbang 20 miliar dolar AS dari 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Kerja sama antara Kementerian Pariwisata dengan Bank Indonesia salah satunya. Kerja sama juga telah dan terus diperkuat. Terutama dalam kemudahan akses pembiayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar destinasi pariwisata.

Bank Indonesia dengan kantor perwakilannya di berbagai wilayah Indonesia mendukung pengembangan sektor pariwisata. Seperti memberikan pelatihan dan pembinaan untuk 500 UMKM di 46 kantor perwakilan dalam mengangkat kerajinan setempat yang bisa dikembangkan dengan pariwisata seperti menjadi souvenir dan lainnya.

Bank Indonesia dan Kementerian Pariwisata selama ini sudah ada kerja sama untuk investasi pariwisata. Ke depannya kerja sama akan dilakukan lebih intensif, seperti lima kantor

perwakilan Bank Indonesia di luar negeri siap mengarahkan investor agar berinvestasi di bidang pariwisata di Indonesia. Bank Indonesia nantinya juga akan memiliki satu divisi khusus untuk pengembangan pariwisata dan *halal tourism*.

Bagaimana kemudahan transaksi dalam sistem pembayaran dapat membantu meningkatkan minat berwisata?

Saat ini dunia sudah berkembang ke arah digital. Untuk itu di Kementerian Pariwisata, saya mendorong untuk dilakukannya sebanyak mungkin *digital initiatives*. Kita tidak bisa melawan zaman, justru kita harus mengikutinya. Di masa sekarang, hampir semua memanfaatkan keunggulan digital termasuk di dalamnya adalah kemudahan dalam bertransaksi.

Tren wisatawan nusantara dan mancanegara pun sudah beralih ke digital. Wisatawan sekarang sangat memanfaatkan digital. Mulai dari memantau jadwal keberangkatan, atraksi yang ada di lokasi wisata, memesan hotel, dan transportasi, semua mereka lakukan secara digital. Hal ini sangat memudahkan mereka.

Saya memiliki *tagline* yaitu "The more digital, the more personal. The more digital, the more professional. The more digital, the more global". Semakin digital maka Kemenpar akan bisa menggunakan beragam aplikasi dan *digital tools*. Fungsinya untuk menyentuh satu per satu konsumen secara personal. Kita bisa tahu demografi, psikografi, dan perilaku konsumen kita satu-satu. Semakin digital maka cara kerja kita dalam menggaet wisatawan akan semakin profesional.

Bank Indonesia sendiri juga mendukung penerapan *go digital* ini di berbagai destinasi wisata dengan mengaplikasikan sistem transaksi digital berbasis uang elektronik. Wisatawan harus memiliki banyak opsi dalam bertransaksi.

Anda sempat menyebutkan perlunya deregulasi untuk meningkatkan sektor ini. Bagaimana langkah yang dilakukan terkait kebijakan deregulasi tersebut?



Untuk mencapai target kunjungan wisman, Kemenpar akan menambahkan tiga strategi besar, yaitu *insentif airlines*, *hot deals* dan *CDM*.

Saya beberapa kali menyinggung tentang Vietnam yang pertumbuhan sektor pariwisatanya cukup mencengangkan. Pertumbuhan pariwisata yang signifikan di tahun 2016 menempatkan Vietnam sebagai negara ketujuh di dunia dengan pertumbuhan pariwisata tercepat di dunia versi UNWTO (World Tourism Organization). Dalam hal pertumbuhan, sekarang pesaing kita bukan lagi Malaysia, Singapura, atau Thailand yang pertumbuhan pariwisatanya di bawah 5%. Saingan kita sekarang adalah Vietnam yang menjadi *investor darling*. Pertumbuhan pariwisata Vietnam tahun 2016 naik 24,6% dibanding tahun 2015.

Bahkan, jumlah kunjungan wisman nya per Juli 2017 naik lebih dari 30% dibanding periode yang sama pada 2016 (*year on year*).

Apa penyebab peningkatan pesat Vietnam itu dan apa yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasinya?

Faktor penting yang menjadi kunci sukses pariwisata Vietnam adalah deregulasi. Pertumbuhan pariwisata Vietnam yang signifikan di tahun 2016, terjadi lantaran mereka melakukan deregulasi ulang sektor pariwisatanya mengacu pada praktik-praktik terbaik. Karenanya banyak investor yang tertarik berinvestasi di Vietnam.

Sebaliknya di Indonesia,

pariwisata kita masih tersandung oleh regulasi di berbagai aspek yang menimbulkan inefisiensi. Menanggapi hal ini berulang kali saya tegaskan bahwa persaingan saat ini adalah yang cepat akan memakan yang lambat. Konsep deregulasi dalam sektor pariwisata adalah *ease of entry* dan *ease of doing business*, yakni mempermudah masuknya wisatawan atau juga investor, dan mempermudah para investor menanamkan modalnya di sektor pariwisata.

Apakah slogan 3A (akses, atraksi, amenities) masih relevan saat ini atau apakah perlu pengembangan lebih jauh?

Konsep 3A merupakan hal mendasar dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Ketiga hal tersebut akan saling berkaitan dan mempengaruhi terhadap satu destinasi pariwisata. Satu atraksi yang memiliki potensi besar, tidak akan tergarap maksimal jika tidak ditunjang dengan amenities dan aksesibilitas yang baik.

Untuk aksesibilitas, Kementerian Pariwisata mendorong hadirnya *Low Cost Carrier Terminal* (LCCT). Pertumbuhan penumpang internasional setiap tahunnya rata-rata 13 persen per tahun. Dari angka tersebut, pertumbuhan penumpang yang menggunakan layanan *Full Service Carriers* (FSC) sekitar 7 persen, sementara *Low Cost Carriers* tumbuh 55 persen per tahun. Indonesia sampai saat ini belum memiliki LCCT sehingga maskapai dengan konsep LCC harus mendarat di terminal biasa yang biayanya tinggi. Untuk mencapai target kunjungan wisman, Kemenpar akan menambahkan tiga strategi besar, yaitu *incentive airlines* (salah satunya dengan LCCT, red), *hot deals* dan *CDM* (*competing destination model*). ■





▼ Penggunaan Kartu ATM/Debet

Q: @bank_indonesia,
Untuk pemegang kartu ATM GPN, apakah ada minimal nominal pembelian untuk bisa menggunakan kartu debit? Saya barusan belanja di Kima Farma, saya tanya apakah bisa pakai kartu debit? Petugas menjawab, harus minimal pembelian senilai Rp100.000. Mohon infonya.

CALVIN F. G. P.

A: Terkait dengan minimum transaksi menggunakan debit, kami sampaikan bahwa BI tidak mengatur mengenai minimum transaksi pada penggunaan kartu kredit ataupun kartu debit terkait dengan hal itu #SobatRupiah dapat konfirmasi kepada merchant terkait.



INTERKONEKSI KANAL PEMBAYARAN

Keterhubungan antara jaringan pada kanal pembayaran yang satu dengan kanal pembayaran lainnya.

INTEROPERABILITAS KANAL PEMBAYARAN

Kondisi dimana instrumen pembayaran dapat digunakan pada infrastruktur lain selain dari infrastruktur penerbit instrumen pembayaran yang bersangkutan.

PORTOFOLIO INVESTMENT:

Sejumlah sekuritas yang dimiliki oleh perseorangan atau perusahaan sebagai salah satu cara penanaman modal

FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI):

Aktivitas ekonomi dimana investor dari suatu negara menanamkan modal jangka panjang baik dalam bentuk finansial maupun manajemen ke dalam

entitas usaha yang berada di negara lain

SOVEREIGN CREDIT RATING:

Penilaian kemampuan suatu negara untuk memenuhi kewajiban keuangannya.

SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BI:

Transaksi swap beli bank dalam valas terhadap rupiah dalam rangka lindung nilai yang dilakukan antara bank dengan BI.

DEVISA:

Saldo valuta asing pada bank dan alat pembayaran luar negeri lainnya kecuali uang logam yang mempunyai catatan kurs resmi pada Bank Indonesia; di kalangan perbankan internasional, devisa sama dengan valuta asing (deviezen)

#Blskuit

Bank Indonesia Kuis dan Trivia



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Sejak 3 September 2018, berlaku Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/2/PBI/2018 tentang pembawaan Uang Kertas Asing (UKA).

Misalkan Bank VXR yang berizin, membawa UKA senilai 1,965 Miliar Rupiah ke Indonesia. Karena hanya memiliki persetujuan membawa UKA senilai 1,2 Miliar Rupiah dari Bank Indonesia, maka Bank VXR tersebut dikenakan denda.

Berapa denda yang harus dibayar Bank VXR?



Kirim jawabanmu melalui email bicara@bi.go.id dengan menulis subject email #Blskuit Majalah Gerai Info Edisi 73



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



Langkah Bank Indonesia

Dalam Menjaga Stabilitas Nilai Tukar dan Pengendalian Inflasi



Menaikkan Suku Bunga Kebijakan

Menaikkan suku bunga BI-7DRRR sebesar 125 bps menjadi 5,50% selama tahun 2018



Melakukan Intervensi Ganda

Intervensi di pasar valas dan pembelian SBN dari pasar sekunder



Menyediakan Instrumen Swap Valas & Swap Hedging

Biaya yang lebih murah dan syarat yang lebih mudah



Melakukan Relaksasi Makroprudensial & Akselerasi Pendalaman Pasar Keuangan

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi



Memperkuat Sinergi & Koordinasi

Dengan Pemerintah dan Lembaga Keuangan Terkait





BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



5

5 tahun BICARA 131 melayani
publik dengan keterbukaan informasi dan tetap
memberikan yang terbaik **bagi Indonesia**

BICARA 131, we always provide solution



www.bi.go.id



[BankIndonesiaOfficial](#)



[@bank_indonesia](#)



[bank_indonesia](#)



[Bank Indonesia Channel](#)



[Contact Center : 131](#)